

## SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

Apabila tidak dilengkapi dokumen pengoperasian kendaraan muatan barang, maka bisa terjadi peredaran barang secara ilegal.

Nomor SOP	:	19/201/2010-11/10/2025
Tgl. Disahkan	:	8 Oktober 2025
Tgl. Revisi	:	
Tgl. Diberlakukan	:	
Disahkan oleh	:	Kepiala B TID Kelas II Sumatera Utara  EALI PENGY OLA TRANSPORTA II DARAT Ariya Idi Ariyus, SISITA, M.M.

	2	darat kelas II sumatera utara		BALA PENGLOLA TRAMPORTAGI DARAT Ariya (di Ariyus, S.ISiT), M.M. NIP 19681027 199103 1 001				
De	sar Hukum:	PEMERIKSAAN DOKUMEN KENDARAA		GKUTAN BARANG ra mengatasi:				
1.	Undang-Un Lintas dan Peraturan	ndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Angkutan Jalan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang	Melakukan pengecekan ulang dalam pemeriksaan dokumer sebelum kendaraan melanjutkan proses pemeriksaan selanjutnya dan dilakukan oleh personil yang berkompeten					
2.		Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		dan cakap dalam bekerja Menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan				
3.	Peraturan Angkutan	Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Jalan	2.	dokumen pengoperasian kendaraan muatan barang, sesuai dengan standar pelavanan minimum				
4.		Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 engujian Berkala Kendaraan Bermotor						
5.		Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2015 enyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan						
6.	Tentang Or sebagaima Republik I Nomor 154	Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2016 rganisasi dan Tata Cara Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat na telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan ndonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PM 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Balai Fransportasi Darat						
7.	Tentang Pe	Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 eta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian gan						
8.		Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 enyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di						
9.		Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 736 Tahun 2017 Edoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Ii Jalan						
10.	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK No 1809/HK 201/DRJD/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat							
Ke	terkaitan:		Per	ralatan:				
A.	Standar:		1.	Komputer				
1.	ISO 9001:2	2015 Klausul 8.1 tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasi	2.	Sistem Informasi Penimbangan Kendaraan Bermotor				
2.	ISO 9001:2 Jasa	2015 Klausul 8.5.1 tentang Pengendalian Penyediaan Produksi dan	3.	Bukti Lulus Uji				
В.	SOP:		4.	Surat Muatan				
1.	SOP Peneta	apan Regu Kerja						
2.	Semua SOI UPPKB	P terkait fungsi pengawasan, penindakan, dan pencatatan di						
3.		sunan Laporan Berkala Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang						
Per	ringatan: Risiko yang	g mungkin terjadi						
		g mungkin terjadi nen kendaraan terjadi kesalahan dan/atau tidak teliti pada saat						
1.	penginputa	n, maka berpotensi hasil pengawasan fisik dan dokumen tidak dapat dipertanggungjawabkan						

			Pelaksana			Keterangan		
No	Uraian Jenis Kegiatan	Korsatpel	Petugas Penimbangan/Penguj i Kendaraan Bermotor	PPNS	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan regu sesuai Jadwal Pelaksanaan Tugas Regu Kerja UPPKB				Jadwai Pelaksanaan Tugas Regu Kerja UPPKB	10 menit		Lihat SOP Penetapan Regu Kerja
2	a. Menghimpun informasi administrasi pengemudi dan kendaraan b. Memasukkan informasi administrasi ke dalam Sistem Informasi JTO c. Memeriksa kesesuaian data aktual angkutan barang dengan informasi yang tercantum pada Bukti Lulus Uji d. Mengembalikan dokumen administrasi / menyimpan Bukti Lulus Uji apabila terjadi proses penilangan e.Menerima dokumen administrasi untuk dikembalikan kepada pengemudi. f. Mengembalikan dokumen administrasi kepada pengemudi				1. SIM 2. Bukti Lulus Uji 3. STNK 4. Surat Muatan Barang. 5. Sistem Informasi Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang	5 menit	Kesesuaian dokumen dengan aturan yang berlaku; ada atau tidak; keabsahan; dan masa berlaku     Data Aplikasi JTO	a. Lihat SOP Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Angkutan Barang. Untuk data kendaraan tempelan dan/atau gandengan juga dimasukkan kedalam Sistem Informasi; b. Penyitaan Bukti Lulus Uji dilakukan apabila kendaraan dikenai proses penilangan. c. Point (f) dilakukan apabila tidak ada pelanggaran dokumen administrasi dikembalikan kepada pengemudi
3	Menerima informasi dugaan pelanggaran dari Bukti Lulus Uji				Sistem Informasi     Penimbangan Kendaraan     Angkutan Barang     SIM     Bukti Lulus Uji     STNK     Surat Muatan Barang.	5 menit	Surat Pemberkasan     (Blangko Tilang)     Berita Acara Penyerahan     Penyidikan     Surat Pengantar Sidang	Lihat SOP Penindakan Pelanggaran Dokumen Kendaraan Angkutan Barang oleh PPNS
4	Menerima laporan terkait pengumpulan dokumen Kendaraan Angkutan Barang sesuai jadwal regu yang sudah ditetapkan				Jurnal Harian	1 menit	Pemeriksaan Dokumen Kendaraaan Angkutan Barang	Pemeriksaan Dokumen Kendaraaan Angkutan Barang tertuang dalam LPSPKAB